



UNIVERSITAS INDONESIA

***GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN
ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT***

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum**

**WAHYU WIDHIANTO
0906581826**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER HUKUM
KEKHUSUSAN KEUANGAN NEGARA
DEPOK
JANUARI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

**Nama : Wahyu Widhianto
NPM : 0906581826
Tanda Tangan :
Tanggal : 5 Januari 2011**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Wahyu Widhianto

NPM : 0906581826

Program Studi : Magister Hukum

Judul Tesis : *Good Governance dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat*

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D.
Ketua Sidang/Penguji/Pembimbing

Tri Hayati, S.H., M.H.
Penguji

Dian Puji Simatupang, S.H., M.H.
Penguji

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 5 Januari 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat-Nya sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Penyusunan tesis ini merupakan syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Guna memenuhi persyaratan tersebut, penulis telah menyusun tesis ini yang berjudul "*Good Governance* dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat".

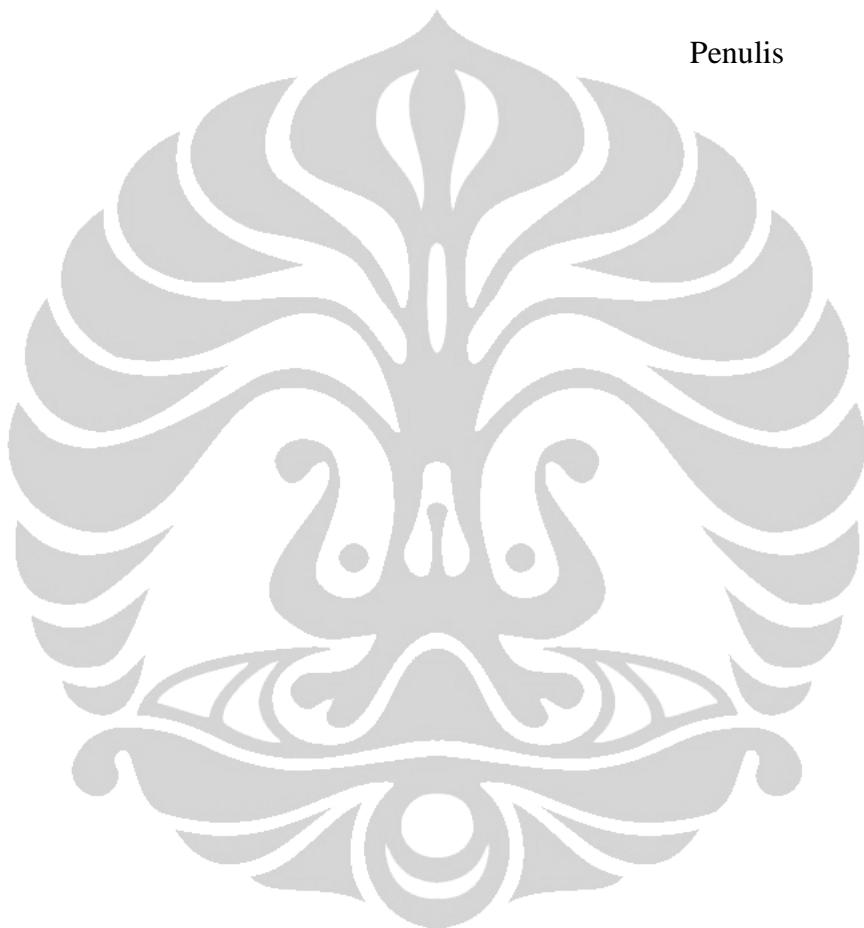
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu dan bapak tercinta atas limpahan kasih sayang yang tulus dan tidak pernah surut dalam mendidik dan mengasuh anak-anaknya.
2. Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk dapat memberikan motivasi, arahan, dan saran kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
3. Istri dan anakku tercinta yang selalu sabar dan setia menemani sepanjang waktu.
4. Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. selaku Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
5. Dr. Nurul Elmiah, S.H., M.H. selaku Ketua Sub Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan bekal pengetahuan dan ilmu di bidang hukum.
7. Bapak/Ibu Pejabat Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang telah memberikan kesempatan dan beasiswa bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan ilmu sebagai bekal dalam pengabdian kepada bangsa dan negara.
8. Teman-teman kantor dan kuliah yang selalu memberikan semangat dan keceriaan.
9. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis menerima atas segala kritikan yang membangun atas penulisan tesis ini. Semoga tesis ini dapat berguna untuk ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum.

Jakarta, 5 Januari 2010

Penulis



HALAMAN PERYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Widhianto
NPM : 0906581826
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Good Governance dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat”

beserta instrumen penelitian. Berdasarkan Persetujuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihkan bentuk, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, serta mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan juga sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Januari 2011
Yang membuat pernyataan

(Wahyu Widhianto)

ABSTRAK

Nama : Wahyu Widhianto
Program Studi : Magister Hukum
Judul : *Good Governance* dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang meneliti bahan kepustakaan sebagai data sekunder yang relevan dengan objek kajian. Pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat masih menghadapi berbagai hambatan. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum ada peraturan teknis yang khusus mengatur penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat. Kewenangan dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat terdiri dari kewenangan pengelolaan administratif (*administratief beheer*) dan kewenangan pengelolaan kebendaharaan (*comptabel beheer*).

Kata Kunci : *good governance*, pemerintah pusat, pelaksanaan anggaran belanja

ABSTRACT

Name : Wahyu Widhianto
Study Program : Master of Law
Title : Good Governance in Central Government Expenditures Budget Execution

This study aims to determine the implementation of the principles of good governance in central government expenditures budget execution. This research is a normative research that examine the literature materials which relevant to the object of study as secondary data. The execution of central government expenditures budget still faces many obstacles. The implementation of good governance's principles scattered in various laws and regulations and there is no particular technical regulation for the implementation of good governance's principles in central government expenditures budget execution. The authority in the central government expenditures budget execution consists of administrative management authority (*administratief beheer*) and treasurer management authority (*comptabel beheer*).

Key Words : good governance, central government, expenditures budget execution

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x

BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	4
1.3 Tujuan Umum dan Khusus	4
1.4 Tinjauan Pustaka	5
1.5 Kerangka Konsep	6
1.6 Metode Penelitian	10
1.7 Kegunaan Teoritis dan Praktis	12
1.8 Sistematika Penulisan	12
BAB 2 <i>GOOD GOVERNANCE DAN PELAYANAN PUBLIK</i>	14
2.1 Pengertian dan Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	14
2.2 Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik	25
2.3 Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara	26
2.4 Mewujudkan <i>Good Governance</i> melalui Pelayanan Publik .	28
BAB 3 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA	32
3.1 Definisi Anggaran Negara	34
3.2 Model Penyusunan Anggaran	37
3.3 Siklus Anggaran Negara	43
3.4 Fungsi Anggaran Negara	46
3.5 Struktur Anggaran Negara	48
3.6 Pemisahan Kewenangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat	50
3.7 Pokok-pokok Reformasi Penganggaran	57
3.8 Sistem Perbendaharaan di Beberapa Negara	64
BAB 4 PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP <i>GOOD GOVERNANCE</i> DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT	72
4.1 Tujuan Pelaksanaan Anggaran	75
4.2 Asas-asas Umum Perbendaharaan dalam Pelaksanaan	

	Anggaran Belanja Pemerintah Pusat	76
4.3	Tahap-tahap Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat	78
4.4	Penerapan Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	89
4.5	Hambatan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja	98
BAB 5	PENUTUP	104
5.1	Simpulan	104
5.2	Saran	104
	DAFTAR PUSTAKA	106



DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Karakteristik <i>Good Governance</i>	7
Gambar	3.1	Subsistem dalam Penganggaran	46
Gambar	3.2	Pemisahan Kewenangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara	51
Gambar	3.3	Pola Hubungan dan Kewenangan Pejabat Perbendaharaan Negara	56
Gambar	4.1	Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Per 30 September Tahun 2008 dan 2009	99

